PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020

Neutrality of State Civil Services in The 2020 Election of Regional Head of Asahan Regency

Hanifah Sadikin, Subhilhar & Heri Kusmanto*

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 04 Agustus 2021; Direview: 04 Agustus 2021; Disetujui: 29 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Asahan tahun 2020 serta mendeskripsikan dan menganalisis apa yang menjadi faktor serta hambatan ketidak netralan aparatur sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode analitis deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa pencatatan peneliti maupun fakta yang akan ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori birokrasi menurut Weber (1974) dan teori netralitas menurut amin yang menyatakan bahwa netral artinya tidak memihak dan tidak terlibat. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan kurangnya netralitas bagi ASN di kabupaten Asahan yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang melibatkan 8 orang ASN dan fakta lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sementara faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran adalah faktor jabatan dan faktor kesamaan golongan. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penerapan aturan netralitas ini memiliki hambatan berupa kendala dari tubuh ASN itu sendiri, belum optimalnya sistem pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan KASN, pemahaman masyarakat terhadap netralitas ASN, dan tidak adanya anggaran pengawasan netralitas ASN dalam PILKADA Pemerintah Kabupaten Asahan.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Netralitas; Pemilihan Kepala Daerah.

Abstrak

This study aims to find out and analyze the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2020 Asahan district head election as well as to describe and analyze what factors and obstacles to the non-neutrality of the state civil apparatus in the 2020 Asahan District Head General Election. The type of research used is descriptive qualitative with descriptive analytical method. This study uses a qualitative approach that produces descriptive data in the form of recording researchers and facts that will be found in the field. This study uses the theory of bureaucracy according to Weber (1974) and the theory of neutrality according to Amin which states that neutral means not taking sides and not being involved. The results of this study revealed a lack of neutrality for ASN in Asahan Regency as evidenced by violations involving 8 ASN and field facts based on observations and interviews. Meanwhile, the factors that lead to the occurrence of violations are the position factor and the group similarity factor. From the research that has been carried out, it was found that the application of this neutrality rule has obstacles in the form of obstacles from the ASN body itself, the suboptimal monitoring system carried out by Bawaslu and KASN, public understanding of ASN neutrality, and the absence of a budget for monitoring ASN neutrality in the PILKADA of the Asahan Regency Government.

Keywords: State Civil Apparatus; Neutrality; Regional Head Election.

How to Cite: Sadikin, H., Subhilhar & Kusmanto, H., (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 11 (1): 355-371.

*Corresponding author:
E-mail: herikusmanto@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut dengan ASN merupakan perangkat Negara yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Aparatur sipil negara juga merupakan abdi Negara (*public servant*) dan abdi masyarakat yang memiliki fokus tugas dan fokus kerja sebagai pelayan masyarakat secara profesional. Sebagai perangkat negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil/ASN merupakan sebuah sarana dari pelaksanaan atau kelengkapan negara yang memiliki tanggung jawab dibidang pemerintahan (Astomo, 2014).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebuah regulasi yang mengatur mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara, tidak hanya mengatur Undang-Undang ini juga mempertegas serta menjelaskan bagaimana Aparatur Sipil Negara seharusnya bersikap Netral sebagai birokrat yang merupakan perangkat negara. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 9 ayat (2) mengatakan bahwa : *“pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”* Dengan dikeluarkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur di atas netralitas tersebut diharapkan dapat menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi public dan keberpihakan. Aparatur Sipil Negara dalam dunia birokrasi sering dijadikan mesin politik terutama pada saat di selenggarakannya pesta demokrasi yang berada pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Netralitas yang merupakan kewajiban bagi ASN saat masa Pilkada sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dimana hal ini bertujuan untuk terlaksananya pelaksanaan pemerintah secara efektif dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan adil dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwasanya salah satu asas dari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen adalah “netralitas” yang artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh manapun dan juga tidak memihak pada kepentingan siapapun yang tidak berhubungan dengan tugasnya.

Disebabkan karena banyaknya pelanggaran pegawai Aparatur Sipil Negara

terhadap di atas netralitas maka isu inipun menjadi sorotan. Persoalan netralitas yang terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara tidak dapat dipungkiri, meski pemerintah telah membuat beragam regulasi yang mengatur dan membatasi hubungan antara Aparatur Sipil Negara dengan kegiatan politik praktis setiap berlangsungnya kegiatan Pemilihan kepala daerah. Umunya pelanggaran ini terjadi saat menjelang, masa kampanye, dan juga setelah pelaksanaan Pilkada yang telah terselenggara pada tahun 2015, 2018, dan 2020.

Dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan bahwa dari 1.038 pelanggaran yang telah dilaporkan, 934 merupakan temuan yang berasal dari Bawaslu, sedangkan 104 pelanggaran lain berasal dari laporan yang diberikan oleh masyarakat. Dari data tersebut KASN telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran. Adapun bentuk-bentuk dari pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara diantaranya adalah mempengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih paslon tertentu, melarang/menghalangi pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu, selain itu ada pula penggunaan fasilitas dan anggaran negara, memengaruhi perangkat desa untuk berpihak kepada paslon tertentu, menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial. Ada juga pelanggaran dengan cara terlibat dalam kampanye, terlibat sebagai tim kampanye atau tim sukses paslon, membuat kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan, dan juga menggerakkan struktur dari birokrasi, mempengaruhi, serta mengintimidasi para pegawai yang berada di bawah jajaran unit kerjanya (Ivanna et al., 2020; Syafitri et al., 2019).

Secara praktis, sampai saat ini birokrasi khususnya Aparatur Sipil Negara masih menjadi organ yang paling diminati dari banyak organ lain oleh para politisi dan kandidat yang akan maju dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah, permasalahan adanya politisasi birokrasi dapat dengan mudah terlihat jika terjadi adanya keterkaitan yang bersifat politis antara Aparatur Sipil Negara dengan kepala daerah yang terpilih melalui penempatan-penempatan jabatan yang tidak berdasar

kompetensi sebagaimana mestinya, namun lebih karena adanya faktor marriage sistem bukan merit sistem sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu hal yang menjadi faktor kenapa Aparatur Sipil Negara tunduk terhadap segala arahan atasannya meskipun hal tersebut melanggar netralitas ialah posisi dari kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Erman & Rayadi, 2013)

Netralitas birokrasi merupakan suatu sistem yang mana birokrasi tidak akan berubah dalam melakukan dan menjaga pelayanannya kepada masyarakat publik, meskipun pimpinannya akan terus berganti ataupun jika adanya upaya yang berusaha meniadakan netralitas pada seorang Aparatur Sipil Negara. Tugas dari birokrasi yang merupakan pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang kualitas aparatur sipil negaraya, walaupun pemimpinnya berganti (Sudrajat et al., 2014; Sudrajat, 2015; Sudrajat, & Hartini, 2017).

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat drastis dalam pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pilkada sementara jumlah dari daerah yang ikut pada pilkada ditahun 2018 tidak lebih banyak dari daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya.

KPU telah menetapkan bahwa sebanyak 270 Kabupaten/Kota menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020. Adapun 270 daerah tersebut meliputi 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 37 pemilihan walikota dan wakil walikota. Pendaftaran pasangan calon telah diselenggarakan pada 16 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020, sedangkan masa kampanye telah dilaksanakan pada 11 Juli 2020 sampai dengan 19 September 2020. Masa kampanye inilah yang memiliki potensi menyebabkan Aparatur Sipil Negara rentan terhadap pengaruh para calon kepala daerah sehingga profesionalitas dari aparatur sipil negaraya tergerus.

Meski baru memasuki tahapan pendaftaran jalur perseorangan pilkada serentak 2020, Bawaslu telah melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap 237 kasus dengan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia. Data yang telah dihimpun hingga bulan Maret 2020 yang lalu

mengungkapkan aksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara cukup beragam, mulai dari mendaftarkan bakal calon hingga mensosialisasikan salah satu bakal calon kepala daerah.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang ikut serta dalam menyelenggarakan kontestasi pemilihan kepala daerah pada 09 desember 2020 lalu, Kabupaten Asahan memiliki jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara yang mencapai 6.508 orang. Secara keseluruhan wilayah Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Banwaslu Sumut) menerima 18 laporan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) dari 23 kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 Sumatera Utara.

Setidaknya terdapat 4 orang Aparatur Sipil Negara yang diketahui melakukan pelanggaran di Kabupaten Asahan pada pilkada tahun 2020. Hal ini sangat di sayangkan mengingat sudah adanya peringatan yang di berikan oleh Bawaslu dan KASN kepada para ASN untuk tetap bersikap netral. Komisioner divisi penindakan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Asahan mengatakan bahwasanya sejak Februari 2020 lalu, pihaknya telah mencatat sejumlah dugaan pelanggaran yang terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Adapun pelanggaran yang melibatkan ASN di maksud meliputi 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 2 camat dan 1 ASN seperti yang mengikuti acara deklarasi tim pemenang dan memposting gambar-gambar pasangan calon di akun media sosial melalui akun pribadi. Temuan dari pelanggaran ini juga sudah diteruskan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan sanksi yang nantinya akan diberikan.

Sejak 20 tahun yang lalu Kabupaten Asahan memiliki kepala daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, dimulai pada masa Jabatan Bupati Drs. H. Risuddin dengan Wakil Bupati Yahdi Khoir Harahap yang menjabat pada tahun 2000-2005 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Asahan masih dipimpin oleh Kepala Daerah yang berasal dari ASN yaitu Pasangan Bupati Taufan Gama Simatupang dan Wakil Bupati H. Surya, BSc. Pilkada serentak

yang dilangsungkan pada 9 Desember 2020 lalu kembali memenangkan pasangan H.Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, yang mana Bapak Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si merupakan anggota Aparatur Sipil Negara dengan jabatan terakhirnya sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan.

Dalam hal ini dapat dilihat selama 20 tahun sejarah Kepala Daerah Asahan seperti tidak pernah lepas dari Aparatur Sipil Negara baik itu dari Bupati Dan Wakil Bupati maupun salah seorang dari pasangan, adanya pengaduan yang terjadi pada pilkada serentak 2020 lalu memberikan tanda tanda besar, adakah keterlibatan dari Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan yang di selenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 lalu.

Andayani Rahma bahwa netralitas aparatur sipil negara dalam organisasi politik serta apa yang menjadi sebab terjadinya pelanggaran netralitas pada aparatur sipil negara, maka hasil dari pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa di perlukannya bimbingan yang baik kepada ASN, dalam penelitian ini faktor yang paling mempengaruhi ASN tidak bersikap netral adalah adanya faktor internal terhadap pasangan calon menjadi alasan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Prasetyo Agus, penelitian ini menyatakan bahwa ASN pada Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih banyaknya didapati sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak netral. Ini terjadi karena adanya tawaran posisi jabatan yang tinggi oleh calon kepala daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas pada pelaksanaan Pilkada di Kabupten Muaro Jambi belum dapat terealisasi dengan baik.

Budiono (2019), kesimpulan yang diberikan dari penelitian ini adalah bahwasanya selama ini ASN masih tidak bisa bersikap netral, disebabkan mudahnya terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi-lobi untuk bisa mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sementara pada pelaksanaan netralitas ASN tentu saja memiliki hambatan atau penyebab. Hambatan ini terdapat pada sisi hukum atau undang-undang, kelembagaan,

aparatur serta dari kesadaran masyarakatnya itu sendiri.

Utomo Hadi dan Sanusi Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Cirebon Tahun 2018 (Sanusi and Utomo, 2020). Hampir seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kota Cirebon dianggap netral, walaupun dalam kenyataannya mereka mendukung salah satu calon akan tetapi tidak ditunjukan secara terang-terangan, karena mereka sudah tahu dan mengerti aturan yang sudah ada mengenai larangan Aparatur Sipil Negara beserta sanksinya. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bahwa adanya dukunyan politik yang di lakukan oleh aparatur sipil negara dengan cara sembunyi-sembunyi. Sudirman Sunarti, Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah menyoroti masalah netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada kota Parepare. Dalam penelitian ini peneliti juga membahas permasalahan dari pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang didapati tidak netral dalam pemilihan kepala daerah di kota Parepare.

Sutrisno, menyimpulkan bahwa didapati dari 3 daerah yaitu Surakarta, Sragen, dan Bantul, terdapat beberapa ASN yang tidak netral dengan beberapa faktor penyebab terjadinya etidaknetralan antara lain, dari sisi loyalitas sebagai Aparatur Sipil Negara, adanya hubungan kekeluargaan, serta ambisi untuk mendapatkan karir dan jabatan, ambiguitas peraturan-peraturan yang ada, serta lemahnya sisi penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam berbudaya hokum (Sutrisno, 2019) Faedlulloh Dodi dan Noverman Duadji (Faedlulloh and Duadji, 2019). Hasil dari studi ini menekankan tentang pentingnya kembali menjaga netralitas bagi Aparatur Sipil Negara. Adapun alternatif langkah yang bisa dilakukan agar netralitas Aparatur Sipil Negara tetap terjaga, yakni dengan pengawasan kolaboratif yang dilakukan pelbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, studi ini menawarkan pentingnya para Aparatur Sipil Negara dibekali dan membekali diri pendidikan kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung hoax di lingkungan birokrasi.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Asahan Tahun 2020. Untuk menganalisis apa yang menjadi faktor serta hambatan ketidaknetralan aparat sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Bog dan Taylor dalam Moleong (2013), mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan “suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku-prilaku yang diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang yang alamiah secara holistik, dengan memposisikan manusia sebagai suatu alat dari pada penelitian itu sendiri, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih mementingkan proses-proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif sendiri adalah sebuah metode penelitian yang memiliki bertujuan untuk menggambarkan sifat dari sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dan penelitian yang dilakukan lalu memeriksa sebab akibat dari suatu gejala tertentu yang terjadi. Pendekatan kualitatif bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini memiliki tujuan guna mengkaji kehidupan manusia dalam masalah-masalah tertentu atau terbatas, sifat kausistik yang dimiliki namun dibahas secara mendalam dan menyeluruh dalam artian tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif.

Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sederhana dengan apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, tahapan dari sebuah penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis yang ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya selanjutnya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang telah diamati itu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif memuat data yang berisi kata-kata baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, serta menjadikan pendapat orang lain atau narasumber menjadi sebuah data yang berguna bagi penelitian. Dengan kata lain metode kualitatif deskriptif tidak lebih pada fakta seadanya yang ditemukan melalui observasi lapangan yang kemudian dikembangkan dengan penafsiran dan penjabaran terhadap fakta tersebut. Maka dapat disederhanakan, metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data namun juga meliputi interpretasi dan analisis terhadap arti dari data itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa pencatatan dari yang peneliti dapatkan maupun fakta yang akan ditemukan dilapangan. Keperluan dalam tesis ini mencakup fenomena pelanggaran netralitas aparat sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2020.

Subjek penelitian merupakan suatu batasan dari subjek penelitian berupa benda, hal maupun orang dari tempat pengambilan data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, maka subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis, hal ini disebabkan pada subjek penelitian itulah data yang berhubungan dengan variabel yang akan peneliti amati. Dalam penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Wakil Bupati Kabupaten Asahan, Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan, Kepala bidang bagian disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, Kepala bidang bagian mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten asahan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Asahan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Asahan, Camat Kisaran Timur, Lurah Siumbut Umbut, Lurah Selawan, Lurah Siumbut Baru, Staf ASN di kantor lurah dan Kepala Lingkungan.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1	Wakil Bupati Kabupaten Asahan	1 (satu) orang
2	Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan	1 (satu) orang
3	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan	1 (satu) orang
4	Bagian Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan	1 (satu) orang
5	Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan	1 (satu) orang
6	Bagian Pelanggaran Dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Asahan	2 (dua) orang
7	Camat	1 (satu) orang
8	Lurah	3 (tiga) orang
9	Staf Asn	5 (lima) orang
10	Kepala Lingkungan	4 (empat) orang
11	Anggota PPS	2 (dua) orang
12	Masyarakat	5 (lima) orang
Jumlah		27 (dua puluh tujuh) orang

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ucapan-ucapan, ungkapan, kesaksian yang diberikan oleh orang terkait yang ada dilapangan, dan tindakan-tindakan dari subyek yang diteliti. Sumber data utama adalah hasil wawancara mendalam dan observasi yang dicatat atau direkam dengan baik. Sedangkan data-data sekunder hanya menjadi penunjang saja misalnya dokumentasi, surat edaran, surat keputusan dan lain-lain. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dengan cara mencatat, merekam serta mendokumentasikan gambar tentang data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu bagaimana netralitas ASN dalam pilkada kabupaten asahan tahun 2020, mencari apa saja faktor dan kendala yang dihadapi oleh ASN untuk bisa bersikap netral dalam pilkada.

Ada 2 jenis sumber data pada penelitian ini, yaitu: Data Primer: Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dari data primer ini kemudian akan diolah lagi. Sumber data diperoleh langsung dari sumber data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti kemudian melakukan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan netralitas ASN, kemudian hasil dari wawacara tersebut akan dirangkum dan ditarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber-

sumber yang ada. Data ini kemudian digunakan untuk mendukung informasi primer sebagaimana yang telah didapatkan baik itu dari literature, bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku-buku dan lain sebagainya. Maka selanjutnya dalam pengumpulan data pada penelitian ini peneliti membutuhkan data primer dan juga data sekunder dalam memenuhi kebutuhan data yang kemudian dilakukan analisis data sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: **metode observasi** dapat dimaksudkan dengan suatu kegiatan dengan cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap prilaku ASN dalam pilkada berdasarkan 2 indikator netralitas yang berupa tidak memihak dan tidak terlibat serta sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, mengamati fenomena dan kejadian yang ada dilapangan.

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pedoman umum yaitu peneliti hanya mencantumkan poin-poin penting yang akan membantu mengarahkan proses wawancara terhadap informan agar tetap fokus dan dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar peneliti dapat terlebih dahulu melakukan rapport yang baik dengan responden

penelitian. Poin-poin tersebut antara lain yang berkaitan dengan bagaimana netralitas ASN Kabupaten Asahan dalam Pilkada, jenis pelanggaran yang dilakukan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran serta hambatannya. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan, keterbukaan, dan hubungan yang hangat pada diri responden terhadap peneliti. Wawancara lanjutan dilakukan sesuai dengan kesediaan responden penelitian tetapi tetap pada kontrol dari peneliti.

Sebagai tambahan yang bertujuan untuk pengumpulan data peneliti juga mengumpulkan dokumen yang berupa keputusan-keputusan, perundang-undangan mengenai pilkada, namun dalam hal ini akan difokuskan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Asahan. Data dicatat dengan cermat dengan ketiga metode ini untuk kesahihan pengumpulan data sebagai informasi yang akan digambarkan atau dijelaskan.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan conclusion drawing atau verification. Metode analisis data merupakan suatu cara yang kemudian digunakan untuk menganalisa penelitian. Keabsahan dari suatu penelitian masih diragukan apabila tidak memiliki adanya analisis data. Maka dari itu Metode analisis data ini sangat mempengaruhi hasil dari pada penelitian.

Miles and Huberman (tahun), menegaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data reduction data, display data, dan conclusion drawing atau verification.

Teknik Analisis data kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Bog dan Biklen adalah: "upaya yang dilakukan melalui data dengan cara organisasi data, pemilihan data agar dapat dikelola, mensistesisannya, serta mencari yang kemudian menemukan suatu pola tertentu, menentukan apa yang penting dan apa hal yang harus dipelajari yang selanjutnya mengambil keputusan akan apa

yang nantinya bisa disampaikan kepada orang lain".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Yamin (2013) mengungkapkan bahwa, ada dua indikator utama dari sikap netralitas politik yang ada ditubuh ASN, dua indikator itu adalah: Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi peserta kampanye pada masa kampanye atau tidak menjadi tim sukses dari pasangan calo tidak menggunakan atribut baik atribut partai atau atribut ASN. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan yang akan menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi ajakan, pertemuan, seruan, himbawan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkup unit kerjanya, masyarakat dan anggota keluarga, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dan kewenangan dalam rangka kemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serentak telah dilakukan pada 9 Desember 2020 lalu. Berbagai permasalahan umumnya masih juga ditemukan dalam kegiatan tersebut, salah satunya adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Masih banyak diketahui bahwa adanya pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada bukanlah hal yang baru hal ini sudah sering terjadi selama pilkada berlangsung. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, telah menunjukkan betapa seriusnya upaya dari pemerintah untuk mempertegas lagi aturan yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan politik dan harus memiliki sikap netralitas yang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, dimana tugas utama dari aparatur sipil negara adalah memberikan pelayanan yang optimal dan adil kepada masyarakat. Melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang memiliki fokus dan berorientasi pada pelayanan publik, sebab aparatur sipil negara tidak lagi berorientasi

melayani atasannya melainkan melayani masyarakat meski begitu ASN tetap harus loyal terhadap atasannya.

Netralitas aparatur sipil Negara merupakan pilar yang sangat penting dalam kelangsungan terselenggaranya pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu aparatur sipil negara sebagai suatu unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara adil, jujur, profesional dan merata. Netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada merupakan suatu hal yang sangat esensial mengingat adanya larangan yang harus ditaati oleh ASN untuk berperan aktif dalam aktivitas pilkada sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Namun kenyataannya masih banyak didapati adanya mobilitas-mobilitas serta keterlibatan ASN yang turut serta dalam aktifitas pada kegiatan pilkada.

Tabel 2. Berikut Adalah Daftar Dari Nama-Nama ASN Yang Terlibat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020

No	Nama	Instansi/Jabatan	Jenis Pelanggaran	Hukuman
1.	Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si	Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan	Melakukan pendekatan kepada partai politik dalam status sebagai sekertaris daerah kabupaten asahan. Mendeklarasikan diri sebagai calon wakil kepala daerah kabupaten asahan dan maju dalam pilkada asahan tahun 2020.	Hukuman disiplin ringan
2.	Supriono	Coordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan	Mengunggah status yang berisikan foto dirinya bersama beberapa orang lain dengan memperlihatkan kalender yang menggambarkan bakal calonbupati dan wakil bupati asahan tahun 2020 dan bertuliskan for asahan 2020, pada akun media sosial miliknya. Melakukan pembiaran penyebaran kalender bakal calon bupati (surya-taufik) pada acara sosialisasi mengenai jam belajar mengajar yang di laksanakan di sdn 015932 desa aek loba.	Sanksi moral berupa penundaan pangkat sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi oleh KASN
3.	Tri Harja, S.Sos	Camat Aek Kuasan	Mengunggah status yang berisikan foto dirinya bersama beberapa orang lain dengan memperlihatkan kalender yang menggambarkan bakal calonbupati dan wakil bupati asahan tahun 2020 dan bertuliskan for asahan 2020, pada akun media sosial miliknya. Melakukan pembiaran penyebaran kalender bakal calon bupati (surya-taufik) pada acara sosialisasi mengenai jam belajar mengajar yang di laksanakan di sdn 015932 desa aek loba.	Sanksi moral berupa penundaan pangkat sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi oleh KASN

4.	Umar, SP,MM	Camat Dalam	Teluk	Menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan kontes dangdut yang di hadiri oleh bakal calon Wakil Bupati Asahan Atas Nama Taufik Zainal Abiding, S.Sos.M.Si. pada acara tersebut terdapat spanduk Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Atas Nama H. Surya, Bsc Dan Taufik Zainal Abiding, S.Sos, Msi	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat sampai dengan dilaksanakannya rekomendari dari KASN.
5.	Agus	Staf Kantor Silau Laut	Camat	Melakukan foto bersama dengan bakal calon wakil bupati asahan atas nama taufik zainal abiding, s.sos, m.si pada tanggal 6 september 2020 didepan posko kemenangan Surya-Taufik Di Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.	Sanksi moral berupa penundaan pangkat sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi oleh KASN
6.	Sofian Manullang, S.Sos	Kepala Polisi Praja Asahan	Sattuan Pamong Kabupaten	Menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati asahan dnegan menerbitkan surat tugas kepada 31 (tiga puluh satu), anggota satuan polisi pamong praja (satpol pp) kabupaten asahan untuk melaksanakan pengendalian keamanan pejabat Negara dan tamu daerah di wilayah Kabupaten Asahan pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati An H.Surya,Bsc Dan Taufik Zainal Abiding, S.Sos. M.Si pada tanggal 5 september 2020, sedangkan pada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati lain tidak di lakukannya pengawalan.	Hukuman disiplin sedang
7.	Dawin Damanik	Staf Pada Pemadam Kebakaran Sataun Pamong Praja	Pada Bidang Pada Polisi	Menunjukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati hendri siregar yang dilaksanakan di jalan tut wuri handayani, kelurahan bunut barat pada tanggal 2 oktober 2020.	Hukuman disiplin sedang
8.	Rahmad Hidayat Siregar	Kepala Komunikasi Informasi Kabupaten Asahan	Dinas Dan	Menghadiri kegiatan yang dihadiri oleh calon bupati dan wakil bupati kabupaten asahan atas nama H.Surya, BSc dan Tufik zainal abidin, S.Sos, M.Si	Hukuman disiplin sedang

Berdasarkan Data yang diolah oleh peneliti melalui observasi data di lapangan, ketidaknetralan ASN akan berdampak pada profesionalisme ASN yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas dari tercapainya penyelenggaraan pemerintahan. Hal lain dari pada itu, pelanggaran dari asas

netralitas juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi (Mokhsen, Putrianti, dan Muhammad, 2018).

Maka untuk mengetahui seperti apa keterlibatan yang dilakukan oleh beberapa oknum ASN Kabupaten Asahan, sebab keterlibatan dan apa saja faktor yang mengakibatkan ASN melakukan pelanggaran tersebut. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 peneliti melakukan wawancara kepada Bagian Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan Bapak Dedi Iskandar Tua Lubis, SE di ruangannya pada tanggal 27 Mei 2021.

Beberapa hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa benar adanya keterlibatan beberapa oknum ASN dalam Pilkada Asahan, meskipun jumlahnya tidak banyak namun hal ini tetap menjadi perhatian yang serius mengingat pemerintah daerah dengan beberapa pihak terkait seperti Bawaslu dan KASN telah melakukan beberapa upaya pencegahan terjadinya pelanggaran tersebut.

Dua indikator dari netralitas aparatur sipil Negara, yaitu tidak terlibat dan tidak memihak. Tidak terlibat adalah tidak menjadi tim sukses pada salah satu calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai ataupun atribut ASN. Maka untuk mengetahui seperti apa keterlibatan, sebab keterlibatan dan apa saja faktor yang mempengaruhi ASN melakukan pelanggaran tersebut.

Jenis-Jenis Pelanggaran Netralitas

Mendeklarasikan Diri Untuk Menjadi Peserta Pilkada Dan Melakukan Pendekatan Terhadap Partai Politik. Berdasarkan dari pasal 2 huruf f undang-undang nomor 52 tahun 2014 tentang ASN, bahwasanya setiap Aparatur Sipil Negara tidak boleh berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (PNS). ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya keterlibatan dalam politik praktis dan berafiliasi dengan partai politik manapun. Salah satu poin dari pelanggaran yang sudah dijelaskan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 adalah ASN dilarang

mendeklarasikan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. sebagaimana yang dilakukan oleh anggota ASN atas nama Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan, beliau mendeklarasikan diri untuk ikut dalam Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020 serta melakukan pendekatan pada partai politik yaitu partai Golkar untuk maju dalam Pilkada sedangkan statusnya masih sebagai anggota ASN yang sah. Sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui undang-undang ASN yang mengatur bahwasanya bagi ASN yang akan maju dalam pilkada untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri. Hal ini tertulis dalam pasal 119 dan pasal 123 menyatakan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari ASN sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Sebagai ASN beliau berhak memilih dan dipilih dalam politik jadi mengapa dijatuhi hukuman disiplin ringan oleh KASN. Melalui ungkapan tersebut maka dapat diketahui bahwa Bapak Wakil Bupati Asahan masih kurang memahami batasan-batasan sebagai aparatur sipil Negara dalam berpolitik sehingga melakukan pendekatan terhadap partai politik saat masih menyandang status ASN dan menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan.

Selain dari pada pelanggaran dalam bentuk mendeklarasikan diri untuk menjadi peserta pilkada, beliau juga melanggar aturan netralitas pada larangan melakukan pendekatan dengan partai politik terhadap pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka atas pelanggaran yang sudah dilakukan maka Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan diberikan sanksi hukuman disiplin sedang berupa penundaan pangkat selama satu tahun, penundaan berkala satu tahun.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2004, Wakil Bupati Asahan Yang Pada Saat itu masih menjabat Sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Asahan dengan jelas sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps

Dan Kode Etik PNS, Pasal 11 huruf c, di mana untuk menjaga netralitas ASN, wajib menaati 7 larangan selama pilkada, dimana salah satu larangan tersebut adalah ASN di larang melakukan suatu pendekatan terhadap partai politik yang berkaitan dengan rencana dari pengusulan dirinya maupun pengusulan terhadap orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta dilarang meakukan pendeklarasian dirinya yang akan maju dalam pilkada.

Foto Bersama Pasangan Calon Dan Mengunggahnya Keakun Media Sosial. Diantara perbuatan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran netralitas adalah melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin daerah, menghadiri deklarasi calon pemimpin daerah dengan atau tanpa atribut partai, mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui mediasosial, melakukan foto bersama, dan menjadi pembicara dalam pertemuan partai. Aturan tersebut sudah tertera pada Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada di atas netralitas.

Yang dimaksud dengan netralitas adalah bebas dari pengaruh partai politik. Salah satu staf Kantor Camat Silau Laut atas nama Agus juga mejadi salah satu ASN yang masuk ke dalam daftar nama 8 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas ASN. ASN tersebut melakukan pelanggaran berupa foto bersama dengan Bakal Calon Wakil Bupati Asahan Atas Nama Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si pada tanggal 6 september 2020 didepan posko kemenangan Surya-Taufik Di Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik PNS maka ASN harus mentaati 7 poin yang sudah di tetapkan, dalam kasus telah terbukti melakukan pelanggaran pada poin ke lima, dimana poin tersebut menegaskan bahwa ASN di larang melakukan foto bersama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui foto tersebut tentu sangat menunjukan ketidak netralan ASN dengan melibatkan diri pada kegiatan calon bupati yang berda diposko pemenangan. Oleh sebab

itu melalui surat keputusan nomor R-3859/KASN/11/2020 yang dikeluarkan oleh KASN menjatuhkan hukuman berupa hukuman disiplin ringan.

Selanjutnya ASN atas nama Tri Harja, S.Sos, yang menjabat sebagai Camat Aek Kuasan, ASN tersebut telah terbuti melanggar netralitas dengan melibatkan diri dalam suatu acara salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Asahan, selanjutnya saudara Tri Harja melakukan foto bersama calon kepala daerah lalu mengunggahnya di akun facebook miliknya.

Penyalahgunaan Wewenang Dan Menggunakan Fasilitas Negara Untuk Kepentingan Sepihak. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN atas Nama Sofian Manulang, S.Sos jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan surat tugas terhadap 31 orang personil polisi pamong praja untuk melaksanakan pengendalian keamanan pejabat Negara dan tamu daerah diwilayah kabupaten Asahan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Atas Nama H. Surya, B.Sc dan Taufiq Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, sementara pengamanan ini tidak dilakukan pada pasangan calon lainnya. KASN mengungkapkan ini merupakan bentuk pelanggaran dengan melibatkan diri beserta personilnya dengan menyalahgunakan wewenang sebagai kepala satuan polisi pamong praja dan menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan sepihak, oleh sebab itu melalui surat keputusan nomor R-607/kasn/2/2021 yang dikeluarkan oleh KASN menjatuhi hukuman disiplin sedang.

Menghadiri Acara Yang Di Selenggarakan Oleh Pasangan Calon Kepala Daerah. Selanjutnya pelanggaran oleh ASN yang dilakukan atas nama Tri Harja, S.Sos, yang menjabat sebagai Camat Aek Kuasan, ASN tersebut telah terbuti melanggar netralitas dengan melibatkan diri dalam suatu acara salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Asahan, selanjutnya saudara Tri Harja melakukan foto bersama calon kepala daerah lalu mengunggahnya di akun facebook miliknya. Pelanggaran kedua yang di lakukan oleh tri harja adalah Melakukan pembiaran penyebaran kalender bakal Calon Bupati (Surya-Taufik) pada acara sosialisasi mengenai jam belajar mengajar yang di laksanakan di SDN 015932 Desa Aek Loba.

Maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik PNS maka pns harus mentaati poin-poin yang sudah ditetapkan, dalam kasus ini saudara Tri Harja telah terbukti melakukan pelanggaran pada poin ke lima dan ke enam, dimana poin tersebut menegaskan bahwa ASN di larang melakukan foto bersama pasangan calon dan mengunggahnya keakun media sosial serta membiarkan terjadinya bagi-bagi kalender yang berisikan foto dari pasangan calon kepala daerah, ini tentu sangat menunjukkan ketidak netralan dan keberpihakan yang sangat jelas. Oleh sebab itu melalui surat keputusan nomor R-2137/KASN/7/2020 KASN menjatuhkan hukuman berupa hukuman disiplin ringan.

Umar, SP, MM juga merupakan salah satu oknum ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran netralitas. Umar, SP, MM yang menjabat sebagai Camat Di Kecamatan Teluk Dalam. Pelanggaran yang dilakukan adalah melibatkan diri pada kegiatan dengan cara Menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan kontes dangdut yang di hadiri Oleh Bakal Calon Wakil Bupati Asahan atas Nama Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si. pada acara tersebut terdapat spanduk bakal pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Atas Nama H. Surya, Bsc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik PNS maka ASN harus mentaati poin yang sudah ditetapkan, dalam kasus ini Saudara Umar, SP, MM telah melakukan pelanggaran pada poin ke empat dimana ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/partai politik. Oleh sebab itu melalui surat keputusan nomor R-3860/KASN/11/2020 yang dikeluarkan KASN menjatuhkan hukuman berupa hukuman disiplin ringan.

Selanjutnya adalah ASN atas nama Darwin Damanik yang bertugas sebagai staf di bagian Staf pada bidang pemadam kebakaran pada sataun polisi pamong praja. ASN tersebut melakukan pelanggaran berupa Menunjukkan keterlibatan diri kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Hendri Siregar dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Tut Wuri Handayani, Kelurahan Bunut

Barat pada tanggal 2 oktober 2020. Maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik PNS maka ASN harus mentaati 7 poin yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pelanggaran tersebut maka melalui surat keputusan nomor R-623/KASN/2/2021 yang dikeluarkan oleh KASN menjatuhkan hukuman berupa hukuman disiplin ringan.

Dan yang terakhir adalah ASN atas nama Rahmad Hidayat Siregar dengan Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Asahan serta menjabat sebagai Plt. Camat kecamatan Kisaran Timur. ASN tersebut melakukan pelanggaran berupa Menghadiri kegiatan yang dihadiri oleh Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Atas Nama H. Surya, Bsc dan Tufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si. Maka Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS maka pns harus mentaati beberapa poin yang sudah ditetapkan. Pada poin ke empat di sebutkan bahwa ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut pasangan calon/atribut partai. Berdasarkan pelanggaran tersebut maka KASN menjatuhkan hukuman berupa hukuman disiplin ringan.

Membagikan Atribut Kampanye Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya ASN atas nama Supriono yang menjabat sebagai Coordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, ASN tersebut melakukan pelanggaran Mengunggah status yang berisikan foto dirinya bersama beberapa orang lain dengan memperlihatkan kalender yang menggambarkan bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 dan bertuliskan For Asahan 2020, pada akun media sosial miliknya serta Melakukan pembiaran penyebaran kalender bakal Calon Bupati (Surya-Taufik) pada acara sosialisasi mengenai jam belajar mengajar yang di laksanakan di SDN 015932 Desa Aek Loba.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik PNS maka ASN harus mentaati 7 poin yang sudah ditetapkan, dalam kasus telah terbukti melakukan pelanggaran pada poin ke lima dan ke enam, dimana poin tersebut menegaskan bahwa ASN di larang

melakukan foto bersama pasangan calon dan mengunggahnya ke akun media sosial serta membiarkan terjadinya bagi-bagi kalender yang berisikan foto dari pasangan calon kepala daerah, ini tentu sangat menunjukkan ketidaknetralan dan keberpihakan yang sangat jelas. Oleh sebab itu melalui surat keputusan nomor R-2136/KASN/7/2020 yang dikeluarkan oleh KASN menjatuhkan hukuman berupa hukuman disiplin ringan.

Mengajak Atau Mengarahkan Masyarakat Untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu. Pelanggaran jenis ini umumnya dilakukan secara diam-diam dan sembunyi sembunyi oleh ASN yang bekerja di wilayah kecamatan atau kelurahan, ini disebabkan camat atau lurah yang memiliki posisi untuk menjabat disuatu wilayah akan dengan mudah mengajak masyarakatnya memilih pasangan calon tertentu, oleh sebab itu untuk mengetahui informasi lebih detail maka peneliti melakukan wawancara terhadap kepala lingkungan yang ada di kelurahan, pada kesempatan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 4 orang kepala lingkungan yang bertugas di Kelurahan Siumbut-Umbut Dan Siumbut Baru, dalam wawancara ini pula kepala lingkungan mengkonfirmasi adanya arahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum ASN agar melakukan pendekatan kepada warga untuk mendukung calon kepala daerah tertentu dengan iming-iming jatah bantuan UMKM sebesar Rp. 2.400.000, hal ini juga di akui oleh para anggota PPS yang bertugas pada pilkada tahun 2020 lalu, mereka menyadari bahwa adanya arahan yang dilakukan oleh kepala lingkungan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, namun mereka menganggap hal ini sudah biasa dilakukan oleh pasangan calon, tidak hanya satu pasangan calon, namun keseluruhan, adanya kerja sama antara tim pemenangan dengan ASN yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu peneliti juga menemukan pertinggal berkas UMKM yang diberi tanda bertuliskan berkas UMKM ST20 sebanyak 40 orang. dengan adanya berkas yang bertanda di kantor lurah ini cukup bisa menjelaskan bahwa adanya keterlibatan oknum ASN yang terlinbat mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan calon tertentu.

Adanya keterlibatan beberapa ASN kelurahan yang melakukan ajakan kepada

masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 saat pilkada tahun 2020.

Menyukai Atau Mengomentari Postingan Dari Calon Kepala Daerah. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media Online maupun media sosial. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di akun media sosial pemenangan pasangan nomor urut dua, peneliti mendapatkan masih banyaknya ASN memberikan tanggapan terhadap postingan tersebut.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran

Dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran asas netralitas ini, pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya yang juga didukung oleh pihak terkait seperti badan pengawas pemilu kabupaten asahan (Bawaslu) dan komisi aparatur sipil Negara (KASN). Pelaksanaan pengawasan melalui upaya preventif, dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi peraturan-perundnag-undangan terkait netralitas ASN yang melalui kerjasama dengan Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk menghimbau ASN untuk netral melalui sosialisai dan zoometing yang dilakukan, selain itu adanya surat edaran yang diberikan kepada setiap instansi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ini adalah: Sosialisasi yang dilakukan oleh KASN, bawaslu, pemerintah daerah kepada para asn yang dilakukan di aula kantor bupati kabupaten asahan dan melalui zoometing, sosialisasi lebih sering dilakukan melalui zoommeeting dengan mengundang seluruh asn untuk menghadiri dari kantornya masing-masing mengingat sampai dengan saat ini masih dalam situasi pandemic covid-19; Membagikan surat edaran Surat edaran nomor 800/2674 tentang netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah kabupaten asahan tahun 2020; Rutin memberikan amanat untuk mengingatkan para ASN agar tetap menjaga sikap netralnya yang dilakukan oleh sekretaris daerah pada saat

memberikan amanat di setiap upacara maupun apel pagi.

Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada

Faktor Jabatan. Bukan hal yang asing lagi bahwa jabatan masih menjadi faktor yang paling sering ditemukan pada fakta yang ditemukan dilapangan apabila terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN dalam pilkada. Patronasi politik masih kerap terjadi yang diakibatkan karena posisi Kepala Daerah yang merupakan pejabat politik sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK sendiri memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi dan mendemosi pegawai ASN. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan pegawai ASN dalam situasi dilematis.

Keterlibatan ASN ini juga di dasari harapan apabila pasangan tersebut nantinya duduk dikursi kepala daerah maka mereka akan mendapatkan promosi jabatan hal ini yang mendorong ASN tersebut mau bersusah payah bahkan sampai berani ambil resiko jika nantinya didapati melakukan pelanggaran. Mereka juga mengungkapkan bahwa hal ini banyak sekali terjadi, mau itu memang dimobilisasi atau atas kesadaran pribadi tapi dengan mendukung salah satu calon merupakan satu jalan untuk menyelamatkan jabatan mereka dan memperjelas jabatan mereka kedepannya.

Penempatan jabatan di kabupaten asahan tidak hanya berdasarkan system merit sebagaimana yang seharusnya di jalankan berdasarkan ketetapan yang sudah di berlakukan oleh pemerintah, ada juga faktor arahan dari atasan untuk melakukan mutasi dan memberikan nama-nama yang nantinya akan menduduki suatu jabatan. Maka kemudian hal ini lah yang menjadi awal dari permasalahan-permasalahan dalam proses pembentukan karakter seorang Aparatur Sipil Negara, sehingga pada tujuan dari diri seorang ASN yang memiliki independensi, objektivitas dan transparan dalam melakukan pelayanan publik akan menjadi lebih sulit dan bahkan tidak dapat tercapai.

ASN lebih takut kehilangan jabatannya daripada melanggar aturan. Dalam dinamika

politik pada pemilihan kepala daerah di Indonesia, posisi ASN dapat dikatakan sebagai posisi yang serba salah. Jika tidak taat kepada atasan maka akan dikatakan tidak loyal terhadap pimpinan. Namun jika ikut terlihat maka mereka akan dinyatakan menyalahi aturan. Hasil penelitian beberapa lembaga mengatakan, bahwa pihak yang paling dominan dalam memanfaatkan ASN dalam Pilkada adalah calon petahana ataupun incumbent. Dengan kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki, calon petahana akan menggunakan jasa ASN agar mau menjalankan kepentingannya. Namun apabila ASN tersebut menolak, maka ASN yang bersangkutan akan dapat dimutasi bahkan dapat dicopot dari posisi dan jabatannya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada lurah dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Selawan, Kelurahan Umbut-Umbut Dan Kelurahan Siumbut Baru, dari hasil penelitian terhadap lurah peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya memang ada pendekatan yang dilakukan oleh calon kepala daerah kepada ASN, khususnya kepada mereka yang memiliki jabatan dan wilayah seperti halnya camat dan lurah, ini disebabkan camat bisa mengintruksikan kepada lurah-lurah yang ada di wilayah kecamatannya untuk mengunpulkan suara masa melalui kepling, belum lagi di tiap kecamatan ada tim dan posko pemenangan yang mana mereka saling berkordinasi untuk mengamati suara dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di lapangan.

Adanya Hubungan Primodial. Pelanggaran ASN terhadap asas netralitas juga dipicu adanya hubungan kesamaan politik, hubungan kekeluargaan, baik hubungan di dalam organisasi maupun diluar organisasi yang kemudian dapat mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga terjadi pada temuan yang didapatkan oleh peneliti dilapangan. Kabupaten Asahan yang sejak tahun 2005 sampai dengan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dipimpin oleh kepala daerah yang berasal dari anggota ASN memicu reaksi yang dilakukan oleh para ASN untuk tetap memilih kepala daerah yang berlatar belakang sama dengan profesinya. Sebagaimana yang telah di umngkapkan oleh Plt.Camat Kota Kisaran

Timur, yang mana Plt.Camat Kota Kisaran Timur merupakan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Asahan yang dalam hal ini juga ikut terlibat menjadi salah satu ASN yang di berikan sanksi berupa hukuman disiplin sedang yang di tetapkan oleh KASN.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa adanya ajakan untuk memilih pasangan yang berasal dari sesama anggota aparatur sipil Negara. Selain daripada hasil wawancara di atas peneliti juga menemukan dokumen berupa surat permohonan pembatalan keputusan KPU kabupaten asahan yang di buat oleh pasangan calon nomor 1 atas dugaan keterlibatan 34 kasus adanya keterlibatan oknum ASN dalam kemenangan pasangan calon nomor 2, mereka beranggapan bahwa adanya keterlibatan ASN yang cukup kuat atas menangnya pasangan nomor urut 2 menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten asahan.

Kurangnya Pemahaman ASN terhadap Aturan Yang Berlaku. Masih banyaknya ASN yang belum dapat memahami aturan netralitas. Mulai dari apa itu netralitas, bagaimana sikap netralitas, apa sajakah yang tidak boleh dilakukan oleh ASN selama masa pilkada berlangsung. Meski upaya pencegahan berupa memberikan sosialisasi yang di adakan atas kerjasama pemerintah daerah, KASN dan bawaslu, namun hal ini belum dapat memberikan pengetahuan yang cukup kepada ASN. Umumnya ASN sekedar tau namun tidak memahami secara detail. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran asas netralitas Asn dalam pilkada adalah kurnagnya pemahaman ASN terhadap aturan yang sudah di tetapkan. Selanjutnya setelah diketahui faktor-faktor ketidak netralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Asahan maka akan dijelaskan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut.

Hambatan Dalam Menegakkan Netralitas ASN Dalam Pilkada. Lemahnya Sanksi Yang Didapatkan. Berdasarkan dari pasal 15 ayat (1) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran dari berbagai jenis larangan kepada ASN akan diberikan sanksi moral dan diberikan tindakan administrative sesuai dengan perundang-undangan, dimana sanksi administrative adalah berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan

hukuman disiplin berat, ini berdasarkan hasil pertimbangan yang dihasilkan melalui proses penyidikan. Sebagaimana hukuman yang sudah diberikan kepada 8 orang oknum ASN yang sudah ditetapkan oleh KASN, mendapatkan hukuman disiplin ringan yang mengakibatkan penundaan pangkat selama satu tahun kerja, penundaan kenaikan berkala selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Nyatanya hukuman ini tidak membuat ASN takut untuk melakukan pelanggaran, justru ASN jauh lebih takut apabila kehilangan jabatan dan dilepas dari jabatannya. ASN tidak takut akan sangsi yang di berikan karena masih bisa dikatakan ringan dan bentuknya hanya administratif, akan sangat dibutuhkan sangsi yang lebih berat untuk bisa meningkatkan netralitas ASN dalam pilkada

Belum Optimalnya System Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu dan KASN. Pengawasan adalah sebuah proses dalam menetapkan suatu ukuran kinerja dan pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, dalam hal pengawasan juga merupakan tugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah yang telah ditunjuk oleh pemerintah bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada serta mencegah adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah sebagaimana ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Selain itu ASN juga lembaga yang memiliki tugas dalam mengawasi masih belum optimal, hal ini disebabkan sampai dengan saat ini posisi dari KASN hanya da di tingkat pusat, dan belum ada di tingkan provinsi, kabupaten dan kota, hasilnya KASN tidak dapat benar-benar optima melaksanakan tugasnya karena masih bisa dikatakan jauh dari ASN, tentunya apabila KASN juga ada ditingkat provinsi, kabupaten dan kota maka pengawasan akan lebih optimal dilakukan.

Kendala Ketiga Adalah Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Netralitas ASN. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, dalam wawancara ini penulis melakukan interfiu terhadap salah satu warga yang menerima bantuan UMKM yang bernama

jefri. Beliau mengungkapkan bahwasanya mereka tau bahwa keterlibatan dan keberpihakan ASN dalam pilkada adalah pelanggaran yang sering terjadi, namun masyarakat tidak memiliki kepentingan dan tidak merasa dirugikan akan hal itu, malah ASN merasa akan lebih mengalami kesulitan saat melapor, karena mereka harus punya bukti, harus dipanggil untuk dimintai keterangan, hal ini jadi lebih menyulitkan mereka, oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih tutup mata atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pilkada. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN di lapangan, masyarakat belum menyadari bahwasanya ada dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Selain itu masyarakat tidak ingin terlibat dengan masalah ASN karena tidak ingin disulitkan dengan proses yang ada jika melaporkan ASN yang melakukan pelanggaran.

Tidak Adanya Anggaran Pengawasan Netralitas ASN Dalam Pilkada Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bagian Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan mengatakan bahwa anggaran terkait pengawasan netralitas ASN memang tidak ada, apa lagi saat ini masih pandemic, anggaran banyak dialihkan untuk penanganan pandemic. Pernyataan tersebut diperkuat dengan tidak adanya pencantuman anggaran di renstra badan kepegawaian daerah kabupaten asahan tahun 2016-2020.

SIMPULAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Asahan, meski jalannya pelaksanaan sudah cukup baik namun ada hal lain yang masih menjadi masalah yaitu pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara. Berdasarkan keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara, ada 8 orang ASN Kabupaten Asahan yang mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain daripada 8 (delapan) orang ASN yang dinyatakan terlewat fakta lain menunjukkan masih banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oknum ASN di tengah masyarakat yang dilakukan dengan cara mempengaruhi warga. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwasanya pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah masih kurang baik. Beberapa pelanggaran yang masih dilakukan oleh ASN antara lain, yaitu: Mendeklarasikan diri untuk menjadi peserta pilkada dan melakukan pendekatan terhadap partai politik, Melakukan foto bersama pasangan calon dan mengunggahnya ke media sosial, Penyalahgunaan wewenang dan menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan sepihak, Menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pasangan calon kepala daerah, membagikan atribut kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, menyukai dan mengomentari postingan dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, B. (2019). Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 129-137.
- Creswell. J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five tradition.
- Erman, E., & Rayadi, R. M. (2014). Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. Jurnal Borneo Administrator, 15(3), 313-332.
- Ivanna, J., Suherwani, E., Hodriani, H., & Iqbal, M. (2020). State Civil Apparatus Services (ASN) In Management of Population Administration In Medan Johor sub-district, Medan City. *PERSPEKTIF*, 9(2), 228-235. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3632>
- Moleong, L.J., (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Sanusi, S., & Utomo, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tidak Netralnya Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam

- undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparat sipil Negara. Jurnal Media Hukum, 23(1).
- Sudrajat, T., Hartini, S., & Kadarsih, S. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah). Padjadjaran Journal of Law, 1(3).
- Sudrajat, T. (2015). Netralitas pns dan masa depan demokrasi dalam pilkada serentak 2015. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 12(3), 351-370.
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 445-460.
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 522-544.
- Syafitri, R. Muda, I. & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. PERSPEKTIF, 8 (2): 72-76.
- Weber, M. (1974), The Teory Of Social And Economic Organization. New York: The Free Pers.1974.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015. Jo.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.